



Dugaan "Mark-up" Anggaran Bupati Cup 2016

Kejari Pastikan Unsur Pidana Terpenuhi

Gianyar (Bali/Post) -

Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar akhirnya memastikan adanya unsur pidana dalam kasus dugaan mark-up dana Bupati Cup tahun 2016. Penanganan kasus ini sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Pengumpulan berkas juga terus dilakukan untuk menyeret tersangka.

Kasi Pidsus Kejari Gianyar Made Endra Arianto, Senin (12/3) kemarin mengatakan, berdasarkan hasil ekspos di internal Kejari Gianyar yang dilakukan kemarin disimpulkan adanya unsur pidana dalam pengelolaan dana yang dikelola PSSI Gianyar. "Unsur pidananya sudah memenuhi sehingga dari hasil pertimbangan dengan pimpinan, disepakati peningkatan kasus ini ke penyidikan," katanya.

Menurutnya, unsur korupsi dalam kasus ini berupa penyimpangan pen-

gelolaan anggaran yang diterima dari APBD Gianyar. Namun seperti apa penyimpangan itu, Endra Arianto belum mau menjelaskannya. "Itu masuk ke ranah materi penyidikan. Belum bisa kita beberkan," ujarnya.

Dikatakan, seluruh bukti terkait dugaan korupsi itu baru akan dibebarkan setelah adanya penetapan tersangka. Saat ini pihaknya sudah mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen.

"Barang bukti ada beberapa dokumen kita dapatkan. Dokumen itu masih dalam

bentuk *copy*-an. Nanti dokumen aslinya juga kita amankan," tegasnya.

Endra Arianto pun mengakui sudah memiliki ancang-ancang menyeret oknum yang akan ditingkatkan dalam kasus ini. Namun, ia mengaku masih mengumpulkan alat bukti yang lebih kuat untuk menetapkan tersangka. "Kita kuatkan alat bukti lagi untuk memastikan tersangka," jelasnya.

Hingga kini Kejari Gianyar sudah memeriksa 23 saksi yang diduga terkait kasus tersebut. Mereka di antaranya

panitia hingga pihak swasta yang diduga terkait pengelolaan dana Bupati Cup. Sementara pemeriksaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Gianyar belum dilakukan. "Kalau ke situ belum. Mungkin nanti bisa merembet ke sana," ujarnya.

Disinggung adanya kemungkinan SP3 pada kasus ini seperti kasus KPPE Desa Lebih, Endra Arianto menegaskan, pihaknya sudah melakukan antisipasi agar tidak sampai terputus di tengah jalan. "Ini sudah kita antisipasi. Kalau kemarin kan karena kerugian negaranya tidak bisa ditemukan. Nah kalau kasus ini, kita sudah melihat ada kerugian negara," tegasnya. (kmb35)

Edisi : Rabu, 14 Maret 2016

Hal : 3